

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi dalam perekonomian global, semakin banyak hambatan serta persaingan yang ada dalam dunia ekonomi nasional. Dalam hal ekonomi internasional pengalokasian yang ada, sumber daya yang langka merupakan salah satu langkah yang menyempurnakan pemenuhan kebutuhan manusia. (AI SOLIHAT n.d.) Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses dimana semakin banyak negara di dunia yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi global. Proses globalisasi adalah perubahan dunia yang bersifat mendasar dan struktural, yaitu berlangsung secara terus menerus dengan laju yang semakin cepat dari waktu ke waktu mengikuti perubahan teknologi sehingga nantinya akan mempercepat perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. (Puput Ayu Pudyastuti, Herman Sambodo 2018:1)

Saat ini, ekonomi dunia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi membuat kegiatan ekonomi sebuah negara tidak dapat terlepas dari kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan yang dimiliki antara suatu negara dengan negara lain. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan geografis, perbedaan faktor produksi, dan adanya asas keunggulan komparatif. (Lailatul Ayu Kusumawati Mochammad Al Musadieg Sri Sulasmiyati 2016:66) Perdagangan internasional memiliki peranan yang besar dalam perekonomian suatu negara. Adanya perdagangan internasional, perkembangannya telah meningkatkan kadar

hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga memperkuat persaingan antar negara dalam menciptakan barang dan jasanya di masing-masing negara. Perdagangan internasional telah menjadi alat dalam meningkatkan perekonomian serta kemakmuran suatu bangsa disuatu negara. (Puput Ayu Pudyastuti & Herman Sambodo 2018:66) Ekspor merupakan salah satu kegiatan utama dari perdagangan internasional. Ekspor bukan hanya sebagai perluasan dari pemasaran domestik, namun ekspor juga merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing global dan memacu pertumbuhan ekonomi. Ekspor harus didasari dengan prinsip dan perencanaan jangka panjang serta komitmen yang kuat. Volume ekspor suatu negara dapat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran. (Lailatul Ayu Kusumawati Mochammad Al Musadieg Sri Sulasmiyati 2016:66)

Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. (Nadia Ayu Lestari n.d.) Kerjasama Indonesia – Jepang bukanlah sesuatu yang baru bagi kedua belah negara. Sudah sejak lama Indonesia dan Jepang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi di sektor industri manufaktur, bahkan juga pengembangan usaha kecil dan menengah. Kesepakatan diantara kedua belah negara antara Indonesia dengan Jepang dilakukan karena keduanya telah memiliki hubungan ekonomi yang sangat lama. Alasan lainnya tentu karena masing – masing negara menganggap negara mitra adalah negara yang penting bagi ekonominya.

Terlebih lagi sejak dimulai dari tahun 1954, dalam bentuk penerimaan trainee untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, komunikasi transportasi,

pertanian dan kesehatan. Bantuan ODA Jepang yang telah memberikan kontribusi besar melalui bidang pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi. Misalnya, pada saat krisis ekonomi melanda Asia sejak Agustus 1997, Jepang membantu Indonesia yang sedang berusaha keluar dari krisis dalam bentuk pinjaman khusus, perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi pemerintah, dan lain-lain. Begitu pula ketika gempa besar dan tsunami dari lautan Hindia melanda pulau Sumatra pada Desember 2004, Jepang menyediakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana sebesar 640 juta US Dollar. Selama ini, secara kumulatif, bantuan Jepang kepada Indonesia berjumlah 29,5 milyar US Dollar (total kumulatif sampai tahun 2006), oleh karena itu, bagi Indonesia, Jepang adalah negara donor terbesar, demikian juga bagi Jepang, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar. Dengan latar belakang inilah, Jepang dan Indonesia telah memupuk persahabatan selama setengah abad, kedua negara ini telah menjadi mitra penting secara timbal balik. (Derliana 2011:74)

Pada tahun 1958 Jepang dan Indonesia memulai hubungan diplomatik bilateral secara resmi dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Jepang disertai dengan perjanjian pampasan perang dimana Jepang membayar kerugian yang diakibatkan oleh penjajahan Jepang di era perang dunia ke-2. Perjanjian tersebut diawali dengan kunjungan Jepang ke Indonesia sejak tahun 1955 dan Jepang saat itu memang memperbaiki hubungannya dengan negara-negara di Asia setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2.

Hubungan baru yang dinamai “benang merah” berawal dari momentum tersebut untuk mengawali *new strategic partnership* dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, dan pendidikan Indonesia. Dalam momentum 50

tahun persahabatan Indonesia-Jepang telah banyak hubungan kerjasama yang membangun antara keduanya seperti pemberian teknologi dan investasi yang besar oleh Jepang untuk membangun perekonomian Indonesia dan menghasilkan banyaknya lapangan kerja. Sedangkan Indonesia telah memberikan banyak sumber daya alamnya untuk di ekspor ke Jepang terutama gas alam, batu bara dan lemak nabati untuk Jepang. Selain sumber daya alam Indonesia juga memasok banyak sumber daya manusia bagi Industri Jepang di Indonesia. (Binar Sudibyo 2016)

Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan mitra kerja sama ekonomi penting bagi Indonesia. Untuk semakin mempererat kerjasama dan kemitraan tersebut dalam menghadapi era perdagangan dan pasar bebas, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat untuk menyusun suatu perjanjian kemitraan bilateral, yang kemudian dikenal dengan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 20 Agustus 2007.

Tidak hanya dalam aspek perdagangan, Jepang juga menjadi investor terbesar di Indonesia. Kegiatan penanaman modal Jepang di Indonesia sejak pemerintah orde baru mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967. Para investor Jepang tertarik untuk mengkonsentrasikan modalnya pada beberapa sektor tertentu, seperti manufaktur, aluminium, otomotif, tekstil dan garmen, industri elektronik. Di samping sebagai partner dagang dan investor utama, Jepang juga merupakan pemberi bantuan luar negeri terbesar bagi Indonesia. Hal ini dapat terlihat sejak Jepang terlibat aktif dalam pertemuan multilateral di Tokyo tahun 1966, yang bermaksud mengatur kembali masalah utang dan pembangunan Indonesia. Sejak saat itu bantuan Jepang ke Indonesia

terus berlangsung, baik dalam bentuk pinjaman lunak maupun berbagai bantuan program lainnya.

Pada tahun 1997 Indonesia yang juga terkena dampak krisis Asia dan mengalami krisis moneter. Indonesia tentu akan berusaha meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi mengingat kecilnya mata uangnya. Selain itu Indonesia berusaha menurunkan impor agar kondisi negara kembali pulih melalui kegiatan ekspor. Negara tujuan utama ekspor Indonesia adalah Jepang, akan tetapi Jepang yang juga mengalami krisis ekonomi tidak mampu lagi menampung ekspor dari Indonesia karena lemahnya tingkat konsumsi masyarakatnya. Keadaan ini secara otomatis mempengaruhi jumlah impor Jepang yang mengalami penurunan.

Akibatnya krisis yang melanda Indonesia, pada tahun 1998 ekspor Indonesia menurun dan mempengaruhi kondisi bisnis di Indonesia, sulitnya pengusaha dan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan pinjaman luar negeri mereka ke Jepang. Tentu hal ini akan berdampak kembali ke Jepang, karena kredit macet pada perbankan yang menjadi sumber krisis jumlahnya akan semakin membesar. Keadaan seperti ini lalu membuat berkurangnya perdagangan kedua negara dan investasi menurun yang tentu saja merugikan kedua belah pihak. (Yohana Meinar Adityarini 2013:14)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Perdagangan, nilai total perdagangan kedua negara tahun 2018 mencapai USD 37,4 miliar. Neraca perdagangan Indonesia-Jepang tahun 2018 surplus bagi Indonesia sebesar USD 1,5 miliar. Total ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2018

tercatat sebesar USD 19,47 miliar atau naik 9,44 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai USD 17,79 miliar. Sementara itu, impor Indonesia dari Jepang pada tahun 2018 mencapai USD 17,97 miliar atau naik 17,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD 15,24 miliar. Jepang menempati peringkat ke-3 sebagai negara tujuan ekspor utama Indonesia dengan pangsa sebesar 10,5 persen, serta menempati urutan ke-3 sebagai negara sumber impor utama Indonesia dengan pangsa sebesar 9 persen. (Ministry of Trade RI 2019) Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, batu bara, hasil tambang, **udang**, pulp, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dll. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil. (Levi Gocklas C.S Sri Sulasmiyati 2017:195)

Dengan adanya IJEPA, ada langkah baru dalam hubungan Jepang dan Indonesia, yakni dengan terbentuknya hubungan ekonomi melalui kerja sama bilateral dalam peningkatan kapasitas liberalisasi, baik di bidang jasa maupun di bidang barang, promosi dan fasilitasi perdagangan, dan investasi di antara kedua negara. IJEPA juga akan mengakomodasi sejumlah proyek peningkatan kapasitas pada sejumlah aktifitas-aktifitas yang akan meningkatkan daya saing produk Indonesia dalam bidang industri, pertanian, dan kehutanan termasuk inisiatif bersama untuk mempromosikan industri manufaktur. (A Komala n.d.)

Kebijakan perdagangan Indonesia mengalami masa-masa proteksi dan juga masa liberalisasi. Pada awal 1970-an sampai awal 1980-an, tingkat proteksi di Indonesia masih cukup tinggi. Reformasi kebijakan terutama terjadi pada tahun

pertengahan dekade 1980-an. Deregulasi yang paling penting adalah pada tahun 1986 ketika harga minyak turun drastis dan memaksa pemerintah untuk mereformasi kebijakan perdagangannya antara lain dengan menurunkan tingkat tarif dan mengkonversi beberapa lisensi impor. Kebijakan perdagangan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor minyak dan gas dan sasaran kebijakan difokuskan untuk meningkatkan ekspor non minyak dan gas. Dalam meningkatkan ekspor non migas Indonesia melakukan ekspor dibidang perikanan ke berbagai negara salah satunya Jepang, yang mana Jepang merupakan pasar Indonesia dalam hal hasil sumber makanan laut (*seafood*). (Romi Sugianto 2017:1)

Bagi negara Indonesia, ekspor memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan nasional negara. Ekspor merupakan sumber devisa negara yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia harus terus meningkatkan ekspornya ke berbagai negara untuk dapat memperbaiki keadaan ekonominya. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah. Luas perairan yang lebih besar daripada luas daratan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hasil laut yang kaya dan berlimpah. Salah satu bukti bahwa hasil laut Indonesia sangat berlimpah adalah volume produksi perikanan yang meningkat setiap tahunnya. (Lailatul Ayu Kusumawati Mochammad Al Musadieg Sri Sulasmiyati 2016:66)

Salah satu komoditas primadona perikanan yang memiliki permintaan cukup tinggi adalah udang. Udang tercatat berada pada peringkat pertama ekspor perikanan Indonesia dengan sumbangan volume ekspor sebesar 14,13 persen dan nilai ekspor sebesar 42 persen terhadap neraca perdagangan perikanan Indonesia

(KKP 2015). Udang ekspor Indonesia secara umum terdiri atas tiga jenis yaitu udang segar, beku, dan olahan. Namun, hanya udang beku dan olahan yang memiliki nilai ekspor cukup besar masing-masing 77,38 persen dan 21,91 persen (UN Comtrade 2018).

Indonesia memiliki lebih dari 83 jenis udang yang berperan penting untuk menunjang ekspor diantaranya udang putih dan udang krosok. Daerah penangkapan udang di Indonesia yang cukup potensial terdapat di pantai barat Sumatera, pantai timur Sumatera, selat Malaka, pantai utara Jawa, perairan Kalimantan dan Laut Arafura. Hampir semua jenis udang Penaeid kecuali *P.stylifera* dan *Solonocera indicus*, memanfaatkan perairan payau sebagai bagian dari siklus hidupnya sebagai daerah budidaya udang (Suman, 2010).

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Oleh karena itu, walaupun permintaan dunia terhadap impor produk perikanan terus meningkat, jalan ke depan cukup sulit dan berliku. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan, yang terus mengedepankan pentingnya aspek mutu dan keamanan pangan, sehingga perbaikan system pembinaan mutu sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar (Putro, 2006; 2007a,b).(Sumpeno Putro 2008:1)

Produksi udang diperoleh dari perikanan tangkap dan budidaya. Udang budidaya merupakan pengembangan dari udang yang berada di laut. Dahulu tambak lebih banyak digunakan untuk memelihara ikan seperti bandeng, belanak, mujair dan kakap. Komoditas udang ikut dipelihara karena saat air pasang laut,

benih udang ikut masuk ke dalam tambak. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tambak udang berkembang menjadi tempat pembudidayaan yang komersial. Dalam rangka peningkatan produksi udang di tambak dikembangkan Proyek Udang Nasional (PUN) pada tahun 1983-1993 di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Selain itu, masih terdapat beberapa program lainnya yang dibiayai APBN maupun melalui kemitraan dengan swasta diantaranya adalah program Intensifikasi Tambak (Intam) maupun ekstensifikasi tambak. Hal-hal yang menghambat program-program tersebut adalah adanya serangan wabah penyakit udang yang banyak menyebabkan pengusaha tambak udang mengalami kerugian (Soweito, 2000).

Indonesia sebagai suatu negara dengan kepulauan yang besar lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 90.000 km memiliki potensi yang sangat besar untuk budidaya udang air payau. Luas area yang tercatat berpotensi sebagai pertambakan air payau adalah seluas 1,2 juta ha dan jumlah tambak yang ada adalah sekitar 600 ribu ha (50 persen). Tambak yang dibangun sebelum tahun 1985 hanya dirancang untuk memelihara ikan bandeng (*milkfish*). Pada awalnya, komoditas utama yang dibudidayakan di tambak adalah udang windu (*Panaeus monodon*), udang putih (*Panaeus merguensis*), ikan bandeng (*Chanosc hanos* Forsk) dan ikan nila (*Tilapia* sp).

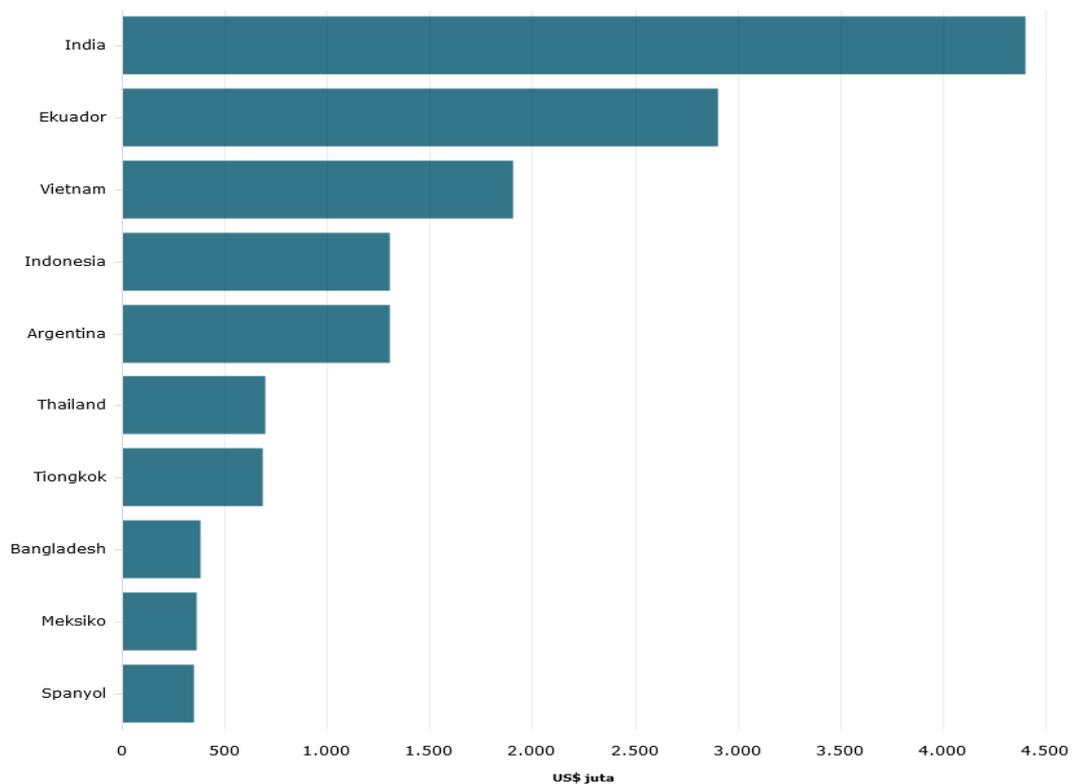
Sejak tahun 1986, pemerintah mulai melakukan intensifikasi budidaya udang, dimana pemerintah mendirikan proyek percontohan tambak udang terpadu di Karawang, Jawa Barat dengan sistem pengelolaan inti plasma. Sejak saat itu, banyak petani bandeng yang beralih membudidayakan udang dan mengkonversi tambak bandeng mereka menjadi tambak udang. Selanjutnya, banyak pula pihak

swasta yang tertarik untuk ikut berinvestasi mendirikan tambak terintegrasi yang difasilitasi beberapa kemudahan oleh pemerintah guna mengembangkan tambak berskala besar yang dipadukan dengan proyek transmigrasi.(Ririn Aristiyani 2017:73)

Sebagai salah satu negara penghasil udang utama di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor udang ke pasar internasional seiring meningkatnya konsumsi udang dunia. OECD (2017) memprediksi bahwa konsumsi udang dunia akan meningkat pada tahun 2025 dari tahun 2015 sebesar 6,7% (Eropa), 7,2% (Asia Pasifik), dan 3,0% (Amerika Utara). Pasar tujuan ekspor utama udang beku dan olahan dunia adalah Amerika Serikat sebesar 33 persen pada tahun 2017 dengan nilai ekspor mencapai US\$ 6,7 milyar. Pasar udang beku dan olahan dunia terbesar kedua adalah Uni Eropa sebesar 22 persen dengan nilai ekspor US\$ 4,9 milyar disusul oleh Jepang sebesar 12 persen dengan nilai ekspor US\$ 2,5 milyar (World Bank 2019).

Pada tahun 2008, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 pengeksportir udang beku dunia setelah Vietnam dan Thailand. Namun, pertumbuhan ekspor Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan India dan Ekuador sehingga pada tahun 2016, Indonesia menjadi peringkat ke-4 setelah India, Ekuador, dan Vietnam dengan pangsa ekspor sebesar 7,73 persen. Untuk udang olahan, Indonesia merupakan eksportir terbesar ke-empat dunia dengan pangsa 6,8 persen yang artinya lebih besar dari Belanda (6,4 persen), Denmark (5,8 persen), dan India (4,3 persen). (S. Samsul Mashari, Rita Nurmawati 2019)

Pasar ekspor udang beku global tahun 2018 tercatat mencapai US\$ 17,2 miliar atau sekitar Rp 232,2 triliun (kurs Rp 13.500/US\$). Indonesia merupakan salah satu eksportir utama udang beku di pasar global, tepatnya di peringkat keempat setelah India, Ekuador, dan Vietnam. Nilai ekspor udang beku Indonesia tahun 2018 menurut *Worldtopexports.com* mencapai US\$ 1,3 miliar atau Rp 17,55 triliun. Pangsa pasar udang beku Indonesia mencapai 7,8%. Pasar ekspor udang beku Indonesia, antara lain ke Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa. (Hari Widowati 2019)



Gambar 1.1 10 Negara Penguasa Ekspor Udang Beku Global di 2018

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sumber penghasil devisa Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan usaha sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu pilar dalam pengelolaan sumberdaya. Keberlanjutan usaha

diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk perikanan dan kelautan baik di dalam maupun luar negeri sehingga berdampak pada kesejahteraan para stakeholder.

Salah satu indikator penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan Indonesia adalah meningkatnya nilai ekspor tahun 2018 dibanding tahun 2017. Berdasarkan rekapitulasi data ekspor yang dilakukan oleh BPS, ekspor produk perikanan dan kelautan periode Januari – September 2018 telah mencapai USD 3,52 Milyar atau meningkat 11,06% dibanding periode yang sama tahun 2017. Kode HS produk perikanan dan kelautan terbagi kedalam 480 kode HS dan dapat dikelompokkan berdasar komoditas utama seperti Tuna Cakalang Tongkol / TCT (21 kode HS), udang (32 kode HS), Rumput Laut (16 kode HS), Cumi Sotong Gurita (17 kode HS), kepiting rajungan (8 kode HS), dan produk lainnya (386 kode HS). (Kaharuddin Sholeh., S.Pi. 2018)

Tabel 1.1 Nilai dan Volume Ekspor Produk Perikanan dan Kelautan 2018

<u>Komoditas</u>	<u>Nilai (USD)</u>	<u>Volume (Kg)</u>
<u>Udang</u>	1,302,330,215.54	147,164,696.07
<u>Tuna-Cakalang-Tongkol</u>	499,951,755.15	116,909,375.79
<u>Cumi-Sotong-Gurita</u>	371,250,811.57	103,408,431.77
<u>Rajungan-Kepiting</u>	370,144,098.01	21,577,303.70
<u>Rumput Laut</u>	213,461,393.07	154,367,194.91
<u>Komoditas Lainnya</u>	766,948,739.91	258,538,363.17
TOTAL	3,524,087,013.25	801,965,365.40

Keterangan : * Data sementara per September 2018

Jepang menetapkan standart yang tinggi untuk menentukan apakah sebuah komoditi layak atau tidak untuk masuk ke negara tersebut, hal ini menciptakan pandangan bahwa apabila sebuah komoditi dapat masuk ke Jepang, maka

komoditi tersebut memiliki kualitas yang baik dan layak untuk diimpor oleh negara lain. (Lailatul Ayu Kusumawati Mochammad Al Musadieg Sri Sulasmiyati 2016:66)

Kedudukan Jepang sebagai tujuan ekspor komoditas perikanan dari Indonesia memang tergolong sangat besar, biasanya yang diekspor ke Jepang adalah tuna yang masih segar untuk dibuat sashimi atau sushi. Pada tahun 2008, jika dilihat dari nilai eksponya, tuna menempati urutan kedua setelah udang. Berdasarkan berbagai alasan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul **“PENGARUH *INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)* TERHADAP EKSPOR UDANG INDONESIA KE JEPANG”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perlu adanya identifikasi masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dicari jawabannya, permasalahan yang ditetapkan untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana IJEPA dalam meningkatkan perdagangan Indonesia ke Jepang?
2. Bagaimana kondisi ekspor udang dan produk udang Indonesia ke Jepang?
3. Bagaimana implementasi program EPA dalam meningkatkan ekspor udang Indonesia ke Jepang?

1.2.1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perlu adanya pembatasan masalah, agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan pembahasan bisa lebih terfokus. Pembahasan penelitian ini dibatasi pada jangkauan ruang lingkup ekspor udang Indonesia ke Jepang. Penulis menetapkan sebuah pembatasan ruang lingkup pada tema, yang meliputi tentang kondisi ekspor udang dan produk udang Indonesia sebagai pengaruh dari implementasi IJEPA di tahun 2018, dan komoditi udang Indonesia yang di ekspor oleh aktor non state, kemudian didistribusikan kepada *wholesalers* di *Central Wholesale Market* Jepang.

1.2.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah, untuk mempermudah kajian permasalahan, maka perumusan masalah yang penulis angkat adalah ***“Bagaimana pengaruh IJEPA terhadap Ekspor Udang***

Indonesia ke Jepang, dilihat dari kondisi ekspor udang dan produk udang Indonesia ke Jepang yang ditentukan oleh implementasi IJEPA?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dari dilakukannya penelitian ini salah satu nya sebagai syarat ujian sidang proposal skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, Jurusan Hubungan Internasional, dan juga tujuan kegunaan lainnya sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dari uraian pada identifikasi masalah maka penelitian ditujukan untuk menjawab permasalahan yang ada, dan mendapat manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian ini, sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh IJEPA dalam kerjasama bilateral Indonesia-Jepang
- b. Untuk mengetahui kondisi ekspor udang dan produk udang Indonesia ke Jepang
- c. Untuk mengetahui implementasi IJEPA dalam mempengaruhi ekspor udang Indonesia ke Jepang

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan dapat mengembangkan kajian penelitian lainnya yang berhubungan dengan implementasi IJEPA terhadap Ekspor Udang Indonesia ke Jepang, dan

memberikan tambahan informasi, serta bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian terkait.

Bagi peneliti, Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti sendiri tentang pengaruh IJEPA terhadap ekspor udang Indonesia ke Jepang. Secara Empiris, hasil dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi IJEPA terhadap Ekspor Udang Indonesia ke Jepang.